

## PENJAMIN MUTU EXTERNAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Novita Sari

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

[novitasari5273@gmail.com](mailto:novitasari5273@gmail.com)

**Abstract:** *The quality of education relates to the achieved or absence of national educational objectives as stated in the LAW No. 20 of 2003 on the national education system. Therefore, the quality of education can be said whether it meets the national standards of education. Fulfilled the minimum education standard which is the national standard of education is a prerequisite to improve the quality of education including Madrasah. The reality that arises that the quality of education in Indonesia is still quite far from what is expected, let alone quality in most madrasah are still many obstacles. Many madrasahs who have not fulfilled the national standards of education, such as educators and educational personnel who have not fulfilled the qualifications and competence standardised, as well as inadequate facilities and infrastructure. This article aims to describe how the role of education quality assurance system in improving the quality of education in the Madrasah.*

**Keywords:** *Quality of Education, Madrasah, National Standards of Education*

**Abstrak:** Mutu pendidikan berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, mutu pendidikan dapat dikatakan baik apabila memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terpenuhinya standar minimal pendidikan yang merupakan Standar Nasional Pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk madrasah. Realitas yang muncul bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih cukup jauh dari yang diharapkan, apalagi mutu di kebanyakan madrasah yang masih banyak mengalami kendala. Banyak madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan, seperti tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang distandarkan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran sistem pejaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

**Kata kunci:** *Mutu Pendidikan, Madrasah, Standar Nasional Pendidikan*

### Pendahuluan

Sebagai suatu sistem, pendidikan Peningkatan mutu pada prinsipnya adalah menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai manfaat tinggi serta sesuai dengan kebutuhan. Sesuatu yang

bermanfaat tidak berguna apabila tidak sesuai dengan kebutuhan, demikian pula sebaliknya. Nilai manfaat dan kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan, masyarakat, dunia kerja merupakan aspek-aspek mutu yang amat penting.

Akuntabilitas mutu pendidikan sudah harus menjadi bagian dari sistem pendidikan di sekolah sesuai dengan tuntutan stakeholder.

Dalam lingkungan pendidikan, khususnya persekolahan tuntutan terhadap quality assurance merupakan gejala wajar karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan bagian dari public accountability. Quality assurance dalam hal ini berperan sebagai salah satu cara atau upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan secara kontinyu. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan, agar masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan, agar masyarakat tersebut mendapatkan hasil pendidikan sesuai dengan harapan dan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan yang berimplikasi pada kepuasan masyarakat (pelanggan) akan hasil pendidikan.

Banyaknya lembaga pendidikan atau persekolahan yang ada tidak menjamin hasil pendidikan yang selalu bermutu sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, hal ini disebabkan keterbatasan-keterbatasan dalam salah satu atau sebagian komponen yang di sekolah, seperti fasilitas atau sarana dan prasarana yang tersedia, profesionalisasi guru, atau bahkan sampai pada komponen kurikulum. Tanggung jawab terhadap mutu pendidikan khususnya mutu proses pendidikan merupakan tanggung jawab semua orang yang terlibat di dalam proses operasi sistem lembaga pendidikan, karena masyarakat pendidikan khususnya tenaga pendidik atau tenaga pengajar dan jajaran pengelola serta pimpinan lembaga pendidikan harus memiliki konsep dan strategi peningkatan

mutu pendidikan secara kontinyu melalui quality assurance sebagai penjamin dalam memperoleh hasil pendidikan, khususnya prestasi belajar siswa yang baik yang pada akhirnya dapat menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang profesional dan kompeten sesuai dengan harapan masyarakat.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi, kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan demikian, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi merupakan salah satu subsistem dari SPM di samping SPMI dan PD Dikti. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Sistem Penjaminan Mutu Eksternal merupakan suatu proses verifikasi oleh pemerintah yang dilakukan oleh BAN PT terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam bentuk akreditasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 bahwa selain memenuhi Standar Nasional Pendidikan setiap program studi wajib memenuhi standar penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan

Perguruan Tinggi. Dengan demikian, jika program studi berkeinginan memperoleh predikat B atau A maka prodi tersebut wajib melampaui standar di atas baik standar akademik maupun standar non akademik.

Dari uraian singkat di atas dapatlah kita pahami bahwa penilaian akreditasi oleh BAN-PT tergantung kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal berbasis Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Kebijakan Nasional Akreditasi (1) Pasal 55 UU DikK (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

Kebijakan Nasional Akreditasi (2) Pasal 55 UU DikK (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

## Kajian Teori dan Pembahasan

### Pengertian Penjaminan Mutu

Mutu dapat berarti kualitas, tingkat, derajat, kadar. Mutu bahkan sering ditafsirkan beragam tergantung sudut pandang masing-masing. Menurut Juran (1993) mutu pendidikan ialah kecocokan penggunaan produk (fitness for us) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri:

1. teknologi yaitu kekuatan
2. Psikologis yaitu rasa atau status
3. Waktu yaitu kehandalan
4. Kontraktual yaitu jaminan
5. Etika yaitu sopan santun

Selanjutnya Deming (1982) mendefinisikan mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen, jika konsumen merasa puas. Hal lain dari definisi mutu adalah sesuai standar, sesuai harapan pelanggan, dan sesuai yang dijanjikan (Kemdikbud: 2016)

Selanjutnya Kemendikbud (2016) menyatakan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan. Jelas mutu diartikan dengan pemenuhan kepuasan pelanggan, sebuah sekolah dikatakan bermutu bila mampu memberikan layanan sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan, dalam hal ini sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai sebuah proses penetapan dan pemenuhan standar, penjaminan mutu

dilaksanakan dengan tiga macam kegiatan, yakni:

a. Pangkalan Data Berbicara mengenai penjaminan mutu maka pangkalan data (data base) merupakan sebuah keharusan dalam organisasi apapun tidak terkecuali organisasi kependidikan seperti sekolah. Sebabnya, semua kebijakan terkait dengan mutu harus didasarkan kepada data

b. Penjaminan Mutu Internal (PMI) Penjaminan Mutu Internal merupakan komponen penting dalam sistem penjaminan mutu. Karena dengan adanya PMI, organisasi akan terbantu dalam melaksanakan PME. Terbentuknya budaya mutu di sebuah satuan pendidikan adalah juga karena adanya motivasi internal untuk meningkatkan mutu lembaga tersebut. Dengan kata lain, lembaga tersebut harus 'internally driven' dalam melaksanakan penjaminan mutu. Kegiatan PMI pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi bahkan melampaui SNP dalam rangka memberi kepuasan kepada internal stakeholder seperti peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Kegiatan PMI merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisonal atau 'internal-horizontaontal accountability).

c. Penjaminan Mutu Eksternal (PME) PME dilaksanakan oleh lembaga eksternal seperti BAS atau lembaga lain yang diakui pemerintah. Dengan demikian, standar yang harus dicapai oleh Satuan Pendidikan ditetapkan oleh lembaga eksternal tersebut. Kegiatan PME adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi bahkan melampaui SNP dalam rangka memberikepuasan kepada 'external stakeholders' seperti orangtua, masyarakat, pemerintah dan lembaga lain yang berkepentingan. Dengan demikian

PME disebut juga pertanggungjawaban horisontaleksternal atau 'external-hoizontal accountability).

Akreditasi sebagai penjaminan mutu eksternal memiliki data mutu. Sebelum lanjut dilihat dulu pengertian akreditasi. Akreditasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "to accredite" yang artinya adalah menilulia kelayakan teknis / akademis suatu lembaga penyelenggara program pendidikan tertentu untuk menghasilkan lulusan dengan spesifikasi kompetensi yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah atau madrasah merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap sekolah sebagai bentuk akuntabilitas public (Kemendikbud: 2017). Dikatakan menyeluruh karena akreditasi menilai kelayakan sebuah sekolah /madrasah pada semua standar 8 dari 8 Standar Nasional Pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah / Madrasah melakukan analisis data ketika melakukan akreditasi, otomatis akreditasi memiliki data mutu berupa perangkat instrument yang sudah diverifikasi, catatan temuan visitasi dan rekomendasi perbaikan. (Kemendikbud: 2017). Data mutu ini diisi dengan prinsip-prinsip kejujuran, objektif, efektif, komprehensif, mandiri, berbasis kesiapan (Permendikbud No 13: 2018). Adapun ruang lingkup akreditasi meliputi: TK / RA, TKLB, SD/MI, SMP / MTs, SMPLB, SMA / MA, SMK/ MAK, dan SMA LB baik sekolah negeri maupun swasta. Manfaat Data Mutu Sebagai kontrol mutu eksternal (salah satu bagian dari SPME) tentu akreditasi memberikan manfaat yang signifikan bagi sekolah/ madrasah. Manfaat tersebut antara lain:

1. Membantu sekolah / madrasah dalam menentukan dan mempermudah

kepindahan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan. (Misalnya, sekolah yang berakreditasi A hnaya dapat menerima siswa pindah dari sekolah yang berarkreditasi A.

2. Membantu mnegidentifikasi sekolah / madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan oleh pemerintah, swasta, atau donatur lainnya.

3. Acuan dalam peningkatan mutu sekolah / madrasah dan rencana pengembangan sekolah / madrasah.

4. Umpan balik dari SPMI sekolah sebagai sebuah hasil kerja keras sehingga dorongan baagi guru untuk selalu meningkatkna diri.

5. Motivator agar sekolah dapat meningkatkna mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan bahkan internasional.

6. Sebagai data mutu sekolah baik bagi sekolah, pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan mutu.

7. Bagi siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri bahwa mereka dapat pendidikan yang layak. (Kemdikbud: 2016)

Tujuan dan Prinsip SPME atau Akreditasi

1. Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan criteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;

2. menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara external baik dalam bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat .

Asas Sistem Akreditasi Nasional terdiri atas:

1. Kejujuran Landasan utama kebenaran, keadilan, keobyektifan, imparsialitas, dan transparansi.

2. Keamanan (trustworthiness) asas dalam membangun dan mencerminkan komitmen atas akuntabilitas dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat.

3. Kecerdasan Asas dalam pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang komprehensif, kredibel, akurat, efektif, dan efisien.

4. Keharmonisan Asas pengembangan independensi kelembagaan akreditasi yang mencerminkan akuntabilitas sekaligus keterkaitan (interrelatedness), keterhubungan (interconnection), dan komunikasi (communication).

Berdasarkan asas di atas, SPME atau akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip:

Prinsip SPME atau Akreditasi

1. Indenpenden

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun.

2. Akurat

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Obyektif

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan



berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.

#### 4. Transparan

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui dan dapat diakses oleh asesor maupun program studi dan/atau perguruan tinggi yang dinilai kelayakannya.

#### 5. Akuntabel

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dapat dipertanggung-jawabkan kepada pemangku kepentingan.

Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi bertujuan untuk menilai dan menentukan kelayakan dan mutu program studi dan institusi perguruan tinggi berdasarkan kriteria dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi pendidikan tinggi juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mahasiswa agar memperoleh layanan pendidikan tinggi yang bermutu.

Adapun fungsi akreditasi adalah untuk:

1. Penilaian sistem penjaminan mutu penyelenggaraan program studi dan institusi perguruan tinggi dalam bidang akademik maupun non akademik;
2. Akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
3. Peningkatan mutu program studi dan perguruan tinggi;
4. Bahan masukan perumusan kebijakan untuk pembinaan dan peningkatan mutu program studi dan perguruan tinggi; dan

5. Pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan mutu pendidikan tinggi. Adapun hasil SPME atau akreditasi sebagai luaran proses SPME atau akreditasi berupa status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

#### Mekanisme SPME atau Akreditasi

Mekanisme SPME atau Akreditasidiawali dengan penyusunaninstrumen oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenanganmasing-masing. Setelah instrumen selesai disusun, LAM atau BAN-PT melakukan SPME atau akreditasi melalui tahap sebagai berikut:

1. Tahap Evaluasi Data dan Informasi,

yang meliputi langkah:

a. Pimpinan perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi program studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi;

b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disimpan dalam PD Dikti. Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh asesor, diutamakan yang berdomisili di wilayah kerja L2 Dikti, dengan melakukan verifikasi data dan informasi yang diserahkan oleh setiap perguruan tinggi. Dalam kondisi tertentu LAM dan/ atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan.

2. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi, yang meliputi langkah:

a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi;

b. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing. Perguruan Tinggi yang merasa keberatan atas keputusan akreditasi dapat mengajukan keberatan kepada BAN-PT atau LAM.

Pemimpin perguruan tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tingginya berakhir.

3. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

a. LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti dan/atau fakta hasil asesmen lapangan;

b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi tersebut.

Tugas dan Wewenang LAM:

a. menyusun instrumen akreditasi program studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b. melakukan akreditasi Program Studi;

c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi;

d. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi program studi;

e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;

f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan program studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

g. memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan program studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum;

h. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada BAN-PT.

## Simpulan

Akreditasi merupakan serangkaian proses dan sistem mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja satuan pendidikan. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses dan hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapkan oleh stake holders. Penerapan

penjaminan mutu ini ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat informal. Penjaminan mutu dilakukan oleh lembaga yang ada diluar organisasi yang bersifat independen secara khusus menjalankan evaluasinya agar terpenuhinya standar mutu untuk akreditasi atau sertifikasi. Penjaminan mutu secara informal, dilakukan oleh suatu gugus penjaminan mutu (quality circle) dalam organisasi itu sendiri (internal) dengan tugas utama adalah menentukan standar mutu, sistem penilaian, dan mengembangkan instrumen untuk melakukan penilaian atau audit tersebut. Dalam penentuan, quality standart merupakan langkah pertama yang harus diambil dalam konteks penjaminan mutu formal maupun informal. Penjaminan mutu formal melalui ISO yaitu merupakan aplikasi dan prinsip penjaminan mutu yang di dalamnya menentukan proses dan sistem yang dijadikan pedoman oleh suatu perusahaan.

## References

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 49-61, 2016.
- MY Nurmaini. Kebijakan Nasional SPME atau Akreditasi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2019.